

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
(RKT)
TAHUN 2021**



**DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR


Dengan mengucap puji dan syukur kehadirat Allah SWT serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Tahun 2021 telah dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu. Penyusunan RKT ini merupakan suatu perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dalam satu tahun dan merupakan penjabaran lebih konkrit dan operasional dari RPJMD Kota Banda Aceh dan Renstra Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh untuk tahun yang bersangkutan.

Informasi yang disajikan dalam RKT ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dalam menyusun rencana anggaran SKPD.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang telah disusun ini semoga dapat dilaksanakan dengan baik dan memenuhi target yang telah ditetapkan sehingga visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dapat tercapai.

Banda Aceh, Januari 2021

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
BANDA ACEH**



Drs. MUZAKKIR, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip.196207141986071002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1 Gambaran Umum OPD.....	3
1.2 Struktur Organisasi.....	5
1.3 Tujuan Penyusunan RKT.....	6
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS.....	7
2.1 Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh.....	7
2.2 Tujuan, Sasaran dan Program Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.....	11
BAB III PROGRAM, KEGIATAN & PENETAPAN KINERJA.....	13
3.1 Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Tahun 2021.....	13
3.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	16
BAB IV PENUTUP	17

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum OPD

Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana pemerintah di bidang perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Banda Aceh sesuai dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 53 tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.

1) Tugas Pokok

Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan tugas urusan umum pemerintahan kota di bidang perhubungan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Fungsi

Fungsi yang diemban Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh adalah :

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang dinas
- c. Penyusunan program dan kebijakan teknis di bidang perhubungan
- d. Pemberian rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang perhubungan
- e. Pembinaan teknis di bidang perhubungan
- f. Pengawasan dan pengendalian di bidang perhubungan
- g. Pembuatan rencana teknis bandar udara umum yang mengacu pada standar yang berlaku
- h. Perencanaan tata ruang bidang perhubungan
- i. Penelitian bidang perhubungan
- j. Pelaksanaan kerjasama pembinaan *Search and Rescue* (SAR)
- k. Pemantauan evaluasi dan pelaporan
- l. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang perhubungan

- m. Pembinaan UPTD
- n. Pembinaan kelompok jabatan fungsional dan
- o. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Kewenangan

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana di atas, Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh mempunyai kewenangan:

- a. Mengusulkan penetapan tarif angkutan darat untuk penumpang kelas ekonomi
- b. Mengusulkan penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan pengamananan (rambu-rambu lalu lintas jalan, danau, sungai dan laut dalam wilayah diluar 4 mil sampai dengan 12 mil laut)
- c. Mengusulkan rekomendasi perizinan dan penertiban dalam sistem manajemen dan pelayanan angkutan perhubungan darat
- d. Melakukan pembinaan perusahaan angkutan darat
- e. Melakukan pengendalian kelebihan muatan dan tertib pemanfaatan jalan
- f. Menetapkan standar batas maksimum muatan dan berat kendaraan pengangkutan barang
- g. Melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas
- h. Melakukan pembinaan dan pembangunan prasarana perhubungan darat
- i. Melakukan penelitian kecelakaan angkutan darat dan perbaikan daerah rawan kecelakaan
- j. Melakukan pembinaan dan penyuluhan keselamatan pemakai jalan
- k. Melakukan pembinaan penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dan kelaikan sarana angkutan darat
- l. Melakukan koordinasi dan pembinaan dengan pihak terkait yang berkaitan dengan lembaga penyelenggara perhubungan laut
- m. Melakukan pengawasan dan pembinaan menyangkut keselamatan pelayaran di bidang perkapalan dan kepelautan
- n. Menetapkan rekomendasi izin pembangunan pelabuhan laut
- o. Melakukan penetapan kebijakan tatanan dan rekomendasi perizinan pelabuhan
- p. Melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan sarana laut

- q. Melakukan pengawasan dan meneliti pengeluaran sertifikat dan dokumen kapal
- r. Melakukan Pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dilaksanakan oleh Administrator Pelabuhan (ADPEL)/Kantor Pelabuhan (KANPEL)
- s. Memberikan rekomendasi izin pelaksanaan kegiatan salvage/pekerjaan bawah air dalam wilayah 4 mil sampai dengan 12 mil laut dari garis pantai
- t. Melakukan pengawasan, pengendalian kegiatan kemaritiman pekerjaan pembangunan lepas pantai, pengangkatan kerangka kapal, pemasangan kabel laut dan bangunan lepas pantai di daerah laut 4 mil sampai dengan 12 mil laut dari garis pantai
- u. Mengusulkan penetapan rekomendasi perizinan usaha angkutan darat dan
- v. Melaksanakan bimbingan teknis di bidang perhubungan

1.2 Struktur Organisasi

Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, merupakan suatu lembaga Pemerintah Kota yang melaksanakan kegiatan di bidang perhubungan yang dibentuk berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 tahun 2016, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.

Susunan organisasi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh terdiri atas :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan
 - 2. Sub Bagian Keuanagan
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, membawahi:
 - 1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
 - 2. Seksi Angkutan
 - 3. Seksi Perlengkapan Jalan dan Alur
- d. Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan , membawahi:
 - 1. Seksi Rancang Bangun dan Teknologi Sarana dan Prasarana
 - 2. Seksi Sertifikasi dan Pengujian Sarana

- e. Bidang Perparkiran, membawahi:
 - 1. Seksi Penetapan Lokasi dan Potensi
 - 2. Seksi Pengutipan dan Penagihan
 - 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Parkir
- f. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan, membawahi:
 - 1. Seksi Audit dan Manajemen Keselamatan
 - 2. Seksi Pengawasan Operasional dan Penindakan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

1.3 Tujuan Penyusunan RKT

Maksud disusunnya Rencana Kinerja Tahunan adalah menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan adalah sebagai acuan bagi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dalam menyusun rencana anggaran OPD.

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS

2.1 Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh

2.1.1 Telahan visi

Visi merupakan suatu pandangan jauh tentang tujuan-tujuan dan tentang hal-hal yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang. Sebuah visi harus berorientasi ke depan, tidak dibuat berdasarkan kondisi saat ini, mengekspresikan kreatifitas, dan mengandung nilai penghargaan kepada masyarakat. Visi juga harus memperhatikan sejarah dan kultur, ideal, memiliki standar yang tinggi, serta bersifat ideal, tetapi juga memberikan semangat kepada berbagai komponen untuk mencapai tujuan-tujuan dari visi tersebut.

Dalam konteks pemilihan kepala daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Visi kepala daerah terpilih dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan berlaku selama 5 (lima tahun). Untuk menyusun visi tersebut, antara lain kepala daerah terpilih harus berpedoman kepada dokumen perencanaan makro (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) dalam rangka sinkronisasi sasaran pokok dan arah kebijakannya.

Atas dasar itu, dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, serta tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang dan jangka menengah Provinsi Aceh, maka Visi Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022 adalah :

“Terwujudnya Kota Banda Aceh gemilang dalam bingkai Syariah”

Visi Pemerintah Kota Banda Aceh ini mencerminkan arah pembangunan Kota Banda Aceh dalam masa lima tahun ke depan. Visi ini juga seiring dengan sasaran pokok dan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banda Aceh yang ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang.

Dalam visi Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022 terdapat 2 (dua) kata penting yaitu “**GEMILANG**” dan “**BINGKAI SYARI’AH.**” Agar tidak multi tafsir, maka berikut ini dijabarkan arti kata-kata tersebut.

Gemilang adalah menjadikan Kota Banda Aceh yang termasyhur dan terpandang dalam 3 pilar utama yaitu agama, ekonomi, dan pendidikan, menuju kejayaan dengan memperhatikan keadilan gender. Sedangkan Bingkai Syariah adalah Mendasarkan seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kehidupan sosial kemasyarakatan sesuai Syariat Islam.

Demi terwujudnya sebuah kota yang gemilang perlu didukung oleh keberadaan dinas/lembaga/badan/kantor pemerintah yang memahami tugas dan fungsinya. Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh merupakan *leading sector* penyelenggaraan pelayanan transportasi serta sarana dan prasarana kepada masyarakat Kota Banda Aceh yang merupakan ibukota Provinsi Aceh yang berfungsi sebagai pusat pendidikan, pemerintahan dan perdagangan dan jasa.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Perhubungan telah menyiapkan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dari tahun ke tahun. Walaupun anggaran yang ada sangat terbatas, namun dengan adanya upaya penyediaan dana dari berbagai sumber lainnya, program yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan untuk mewujudkan visi Walikota/Wakil Walikota Banda Aceh yang akan digunakan sebagai pedoman/acuan seluruh OPD dalam menyusun Rencana Strategis dan Renja OPD.

2.1.2 Telahan Misi

Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan penguraian secara ringkas upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan pemahaman dan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Dalam penyusunannya, perumusan misi memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal, yang memengaruhi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan

daerah. Misi juga disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Dengan gambaran misi yang demikian, Pemerintah Kota Banda Aceh menetapkan 7 (tujuh) misi sebagai berikut.

1. Meningkatkan pelaksanaan Syariat Islam dalam bidang penguatan aqidah, syariah dan akhlak.

Misi ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan benar-benar berada dalam bingkai pelaksanaan syariat Islam secara kaffah.

2. Meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga.

Misi ini dimaksudkan untuk memastikan pemerataan kualitas pendidikan, memajukan seni dan budaya Aceh, melakukan pembinaan kepemudaan, dan membudayakan olahraga sehat dan rekreasi, serta memajukan olahraga prestasi dan olahraga pendidikan pada tingkat regional dan nasional.

3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan kesejahteraan masyarakat.

Misi ini dimaksudkan untuk memberikan landasan yang kuat bagi perbaikan pendapatan masyarakat yang dalam lima tahun ke depan yang berdampak kepada peningkatan PAD dengan kebijakan dan strategi yang efektif sehingga pada gilirannya akan meningkatkan juga kesejahteraan masyarakat dan kemandirian daerah.

4. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat

Misi ini ditujukan untuk menghasilkan kualitas kesehatan masyarakat yang lebih baik melalui upaya penguatan pemberdayaan kesehatan masyarakat yang dicapai dengan kerjasama dan kemitraan, penguatan pembiayaan dan sumber daya kesehatan serta kebijakan penguatan manajemen, regulasi, system informasi kesehatan penelitian dan pengembangan kesehatan.

5. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.

Misi ini dimaksudkan untuk memberikan landasan yang kuat bagi penyelenggaraan pemerintahan dengan birokrasi yang tidak hanya kuat dari sisi legalitas, melainkan juga professional, berintegrasi, berkinerja tinggi,

bebas dan bersih KKN, netral, mampu melayani publik, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

6. Membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mengoptimalkan sumber daya tanpa mengakibatkan kerusakan lingkungan dan memperhatikan keseimbangan antara pembangunan di masa sekarang dan masa yang akan datang.

7. Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan dan kemandirian kelompok perempuan dalam mengejar kemajuannya dan meningkatkan rasa aman dan nyaman kelompok ibu dalam kehidupannya serta tumbuh kembang anak yang baik.

Keterkaitan misi Kota Banda Aceh dengan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh yaitu pada Misi 6 yaitu **“Membangun infrastuktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan”**.

Dimana sesuai dengan tugas pokok Dinas Perhubungan yaitu dengan melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang perhubungan untuk menyediakan fasilitas infrastruktur transportasi kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Program Kepala Daerah yang dilaksanakan dalam tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh yaitu melakukan penataan dan pengembangan sistim jaringan transportasi yaitu dengan meningkatkan jumlah armada penghubung Trans Koetaradja (feeder) dan mengembangkan sistem transportasi massal yang terintegrasi, sehingga melalui arah kebijakan ini akan dapat meningkatkan cakupan layanan transportasi publik di Kota Banda Aceh.

Adapun faktor pendorong pelayanan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh untuk mewujudkan visi misi kepala daerah antara lain yaitu :

1. Adanya bantuan dari Kementerian Perhubungan untuk pengadaan bus angkutan massal sehingga membantu kelancaran angkutan Trans Koetaradja

2. Adanya bantuan operasional dari Dinas Perhubungan Aceh untuk pengoperasian Trans Koetaradja dan rencana subsidi untuk labi-labi sebagai Feeder Trans Koetaradja.

2.1 Tujuan, sasaran dan program Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

a. Tujuan

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun ke depan. Dengan diformulasikan tujuan strategis ini maka Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dapat dengan tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi tuntutan visinya.

Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Dengan adanya penetapan tujuan akan dapat diletakkan kerangka prioritas untuk menentukan arah, guna pencapaian keberhasilan sebagai motivator dan pendorong bagi kinerja yang memuaskan dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Adapun yang menjadi tujuan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh adalah :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan yang memadai
2. Mewujudkan keselamatan, keamanan dan kenyamanan berlalu lintas dalam Kota Banda Aceh.

b. Sasaran

Sasaran merupakan target yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan suatu tujuan yang jelas yang dilandasi dengan visi dan misi yang jelas.

Adapun yang menjadi sasaran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh sampai dengan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya cakupan layanan transportasi publik
2. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana transportasi angkutan darat dan pelabuhan penyeberangan

3. Meningkatnya keselamatan dan ketertiban berlalu lintas dalam Kota Banda Aceh
4. Meningkatnya kelancaran arus lalu lintas dalam Kota Banda Aceh

c. Program

Program adalah instrumen kegiatan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa unit kerja sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi acuan bagi unit kerja dalam menyusun rencana strategis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun program-program yang telah ditetapkan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh untuk dijabarkan dalam rencana kerja setiap tahunnya dalam bentuk berbagai kegiatan yang terukur dari pembiayaan APBD, meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
4. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
5. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
6. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
7. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
8. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
9. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.

Untuk Tahun 2021 dan 2022 program/kegiatan/sub kegiatan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
3. Program Pengelolaan Pelayaran.

BAB III
PROGRAM, KEGIATAN DAN PENETAPAN KINERJA

3.1 Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Tahun 2021

Program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Tahun 2021, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Program ini dimaksudkan untuk menambah dan meningkatkan kinerja dari kapasitas kelembagaan perkantoran. Dalam Tahun 2021, Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ini terdapat 7 (tujuh) kegiatan dan 20 (dua puluh) sub kegiatan dengan menggunakan sumber dana APBK Banda Aceh. Adapun kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Tahun 2021 ini adalah sebagai berikut :
 - 1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja, Perangkat Daerah
 - 1.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - 1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - 1.2.2 Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
 - 1.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.3.1 Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai;
 - 1.3.2 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - 1.3.3 Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

- 1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.4.1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 1.4.2 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 1.4.3 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

- 1.5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.5.1 Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 1.5.2 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel;
 - 1.5.3 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - 1.5.4 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

- 1.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.6.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air & Listrik;
 - 1.6.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

- 1.7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.7.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 1.7.2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel;
 - 1.7.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - 1.7.4. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - 1.7.5. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. Program Penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Dalam program Penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) terdapat 8 (delapan) kegiatan dan 18 (delapan belas) sub kegiatan dengan sumber dana dari APBK Kota Banda Aceh yaitu:

 - 2.1. Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab/Kota
 - 2.1.1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab/Kota
 - 2.1.2. Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab/Kota
 - 2.2. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - 2.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - 2.2.2. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
 - 2.3. Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
 - 2.3.1. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C
 - 2.3.2. Sub Kegiatan Pembangunan Gedung Terminal
 - 2.3.3. Sub Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
 - 2.4. Kegiatan Penerbitan Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
 - 2.4.1. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
 - 2.4.2. Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota

- 2.5. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - 2.5.1. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - 2.5.2. Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - 2.5.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - 2.5.4. Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

- 2.6. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 - 2.6.1 Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 - 2.6.2. Sub Kegiatan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 - 2.6.3. Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota

- 2.7. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.7.1 Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- 2.8. Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.8.1. Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota

3. Program Pengelolaan Pelayaran

Dalam Program Pengelolaan Pelayaran dalam Tahun 2021 ini dengan dana APBK dilaksanakan 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan yaitu;

3.1. Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal

3.1.1. Sub Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal

3.1.2. Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal

3.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDA ACEH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1	2	3		4
1	Meningkatnya cakupan layanan transportasi publik	1.1	Persentase gampong yang terkoneksi transportasi publik	75%
2	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana transportasi angkutan darat dan pelabuhan penyeberangan	2.1	Persentase terminal transportasi angkutan darat yang sesuai standar	65%
		2.2	Persentase standar fasilitas pelabuhan penyeberangan yang terpenuhi	78%
3	Meningkatnya keselamatan dan ketertiban berlalu lintas dalam Kota Banda Aceh	3.1	Jumlah Penurunan Angka kecelakaan lalu lintas	190 kejadian
		3.2	Jumlah penurunan tingkat pelanggaran rambu parkir	94 tilang
		3.3	Persentase Angkutan umum yang laik jalan	82%
4	Meningkatnya kelancaran arus lalu lintas dalam Kota Banda Aceh	4.1	Tingkat kepadatan lalu lintas	0,30

PROGRAM

ANGGARAN

1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	12.353.281.153
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp	17.123.672.400
3	Program Pengelolaan Pelayaran	Rp	501.563.000

JUMLAH

Rp

29.978.516.553

BAB IV PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh yang telah disusun, merupakan perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan dalam satu tahun berdasarkan penjabaran dari RPJMD Kota Banda Aceh dan Renstra Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh tahun 2017 -2022.

Penyusunan RKT sangat penting artinya sebagai acuan bagi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dalam menyusun rencana anggaran OPD, dan untuk memenuhi target yang telah ditetapkan demi tercapainya visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2021**

Unit Kerja : Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

No	Sasaran			Program	Kegiatan/Sub Kegiatan				Ket
	Uraian	Indikator	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah			
					Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi OPD yang tersusun			
					Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Masukan : Dana yang dibutuhkan Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	(Rp) Dok	8.853.700 5	
						Hasil : Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	100	
					Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah			
					Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Masukan : Dana yang dibutuhkan Keluaran : Jumlah waktu pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	(Rp) Bln	7.979.963.823 12	
						Hasil : Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	100	
					Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Masukan : Dana yang dibutuhkan Keluaran : Jumlah waktu jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran yang disediakan	(Rp) Bln	2.713.150.000 12	
						Hasil : Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	100	

No	Sasaran			Program	Kegiatan/Sub Kegiatan				Ket
	Uraian	Indikator	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
					Kegiatan Administrasi Kepegawaian Daerah Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
					Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Masukan : Dana yang dibutuhkan Keluaran : Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang disediakan Hasil : Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	(Rp) Stell %	97.900.000 175 100	
					Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi umum			
					Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Masukan : Dana yang dibutuhkan Keluaran : Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan Hasil : Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	(Rp) jenis %	5.020.000 9 100	
					Sub Kegiatan Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Masukan : Dana yang dibutuhkan Keluaran : Jumlah jenis barang cetakan dan pengadaan yang disediakan Hasil : Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	(Rp) jenis %	50.720.500 11 100	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Masukan : Dana yang dibutuhkan Keluaran : Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilaksanakan Hasil : Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	(Rp) lap %	120.000.000 20 100	

No	Sasaran			Program	Kegiatan/Sub Kegiatan				Ket
	Uraian	Indikator	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
					Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
					Sub Kegiatan Pengadaan Meubel	Masukan : Dana yang dibutuhkan Keluaran : Jumlah Mebeleur yang disediakan Hasil : Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	(Rp) Unit %	7.445.900 3 100	
					Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Masukan : Dana yang dibutuhkan Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan Hasil : Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	(Rp) Jenis %	68.296.000 7 100	
					Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Masukan : Dana yang dibutuhkan Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan Hasil : Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	(Rp) Unit %	22.093.900 6 100	
					Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			
					Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Masukan : Dana yang dibutuhkan Keluaran : Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Hasil : Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	(Rp) Bln %	535.060.000 12 100	
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Masukan : Dana yang dibutuhkan Keluaran : Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan Jumlah jenis cetak dari penggandaan yang disediakan Jumlah jenis porsi makanan dan minuman yang disediakan	(Rp) Jenis Jenis Porsi	320.990.500 38 11 31218	

No	Sasaran			Program	Kegiatan/Sub Kegiatan				Ket
	Uraian	Indikator	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
						Jumlah waktu jasa kebersihan kantor yang disediakan	Bulan	12	
						Hasil : Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	100	
					Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan			
					Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operaional atau Lapangan	Masukan : Dana yang dibutuhkan Keluaran : Jumlah Unit Pemeliharaan, Pembayaran Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	(Rp)	324.568.000	
						Hasil : Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	100	
					Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Masukan : Dana yang dibutuhkan Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	(Rp)	9.100.080	
						Hasil : Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	100	
					Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Masukan : Dana yang dibutuhkan Keluaran : Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhab	(Rp)	80.000.000	
						Hasil : Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	100	
					Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Masukan : JDana yang dibutuhkan Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab	(Rp)	9.938.750	
						Hasil : Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	100	

No	Sasaran			Program	Kegiatan/Sub Kegiatan				Ket
	Uraian	Indikator	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
	Meningkatnya cakupan layanan transportasi publik	Persentase gampong yang terkoneksi transportasi publik	75%	Program Penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Persentase Jaringan LLAJ yang ditetapkan			
	Meningkatnya kelancaran arus lalu lintas dalam Kota Banda Aceh	Tingkat kepadatan lalu lintas	0,30		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab/Kota	Masukan : Dana yang dibutuhkan Keluaran : Jumlah dokumen Perencanaan yang disusun Hasil : Persentase gampong yang terkoneksi transportasi publik	(Rp) dok %	150.000.000 3 75	
	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Transportasi Angkutan Darat dan Pelabuhan Penyebrangan	Persentase terminal transportasi angkutan darat yang sesuai standar	65%		Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	Persentase Perlengkapan jalan yang disediakan			
					Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	Masukan : Dana yang dibutuhkan Keluaran : Jumlah perlengkapan jalan yang tersedia Hasil : Tingkat kepadatan lalu lintas	(Rp) Unit %	2.203.844.000 100 0,30	
					Sub Kegiatan Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan	Masukan : Dana yang dibutuhkan Keluaran : Jumlah Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang dilaksanakan Hasil : Tingkat kepadatan lalu lintas	(Rp) kali %	2.971.117.000 48 0,30	
					Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase sarana dan prasarana terminal yang dikelola			
					Sub Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Masukan : Dana yang dibutuhkan Keluaran : Jumlah Pengembangan Sarana dan Prasarana terminal Hasil : Persentase terminal transportasi angkutan darat yang sesuai standar	(Rp) Jenis %	130.300.000 2 65	

No	Sasaran			Program	Kegiatan/Sub Kegiatan				Ket
	Uraian	Indikator	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
	Meningkatnya keselamatan dan Ketertiban Berjalan Lintas dalam Kota Banda Aceh	Jumlah penurunan tingakt pelanggaran rambu parkir	94 Tilang		Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Masukan : Dana yang dibutuhkan Keluaran : Jumlah rehabilitasi dan pemeliharaan terminal yang dilaksanakan Hasil : Persentase terminal transportasi angkutan darat yang sesuai standar	(Rp) Kali %	300.281.800 3 65	
					Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase izin pembangunan Fasilitas Parkir yang diselenggarakan			
					Sub Kegiatan Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten/kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektornik	Masukan : Dana yang dibutuhkan Keluaran : Jumlah zona parkir / kawasan parkir Hasil : Jumlah penurunan tingakt pelanggaran rambu parkir	(Rp) Kawasan Tilang	7.613.029.000 6 94	
	Meningkatnya keselamatan dan Ketertiban Berjalan Lintas dalam Kota Banda Aceh	Persentase angkutan umum yang laik jalan	82%		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Pakrir Kewenangan Kabupaten / Kota	Masukan : Dana yang dibutuhkan Keluaran : Jumlah juru parkir yang disediakan Hasil : Jumlah penurunan tingakt pelanggaran rambu parkir	(Rp) Org Tilang	1.315.546.000 350 94	
					Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase peningkatan keselamatan pengguna jasa jalan			

No	Sasaran			Program	Kegiatan/Sub Kegiatan				Ket
	Uraian	Indikator	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
Meningkatnya kelancaran arus lalu lintas dalam Kota Banda Aceh	Tingkat kepadatan lalu lintas	0,30		Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Masukan : Dana yang dibutuhkan Keluaran : Jumlah alat pengujian kendaraan yang tersedia Hasil : Persentase angkutan umum yang laik jalan	(Rp) Unit %	54.733.500 2 82		
				Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Masukan : Dana yang dibutuhkan Keluaran : Jumlah bukti lulus kendaraan yang dikeluarkan Hasil : Persentase angkutan umum yang laik jalan	(Rp) Buah %	241.798.100 6.000 82		
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Masukan : Dana yang dibutuhkan Keluaran : Jumlah pemeliharaan alat uji kendaraan bermotor Hasil : Persentase angkutan umum yang laik jalan	(Rp) Kali %	110.000.000 12 82		
				Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan yang dilaksanakan				
				Sub Kegiatan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Masukan : Dana yang dibutuhkan Keluaran : Jumlah pemasangan Perlengkapan dan perbaikan Jalan yang dilaksanakan Hasil : Tingkat kepadatan lalu lintas	(Rp) Kali %	110.000.000 2 0,3		
				Sub Kegiatan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota	Masukan : Dana yang dibutuhkan Keluaran : Jumlah sosialisasi ketertiban lalu lintas dan angkutan yang dilaksanakan Hasil : Tingkat kepadatan lalu lintas	(Rp) Kali %	858.649.000 6 0,3		

No	Sasaran			Program	Kegiatan/Sub Kegiatan				Ket
	Uraian	Indikator	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
	Meningkatnya cakupan layanan transportasi publik	Persentase gampong yang terkoneksi transportasi publik	75%		Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten / Kota	Masukan : Dana yang dibutuhkan Keluaran : Jumlah Penertiban kendaraan dan pengendalian disiplin angkutan jalan yang dilaksanakan Hasil : Tingkat kepdatan lalu lintas	(Rp) Kali %	499.374.000 360 0,3	
Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan / atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					Persentase Angkutan Penghubung untuk Jasa Angkutan Orang dan / atau Barang				
Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan / atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota					Masukan : Dana yang dibutuhkan Keluaran : Jumlah angkutan penghubung yang disediakan Hasil : Persentase gampong yang terkoneksi transportasi publik	(Rp) Unit %	565.000.000 1 75		
	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Transportasi Angkutan Darat dan Pelabuhan Penyebrangan	Persentase standar fasilitas pelabuhan penyebrangan yang terpenuhi	78%	Program Pengelolaan Pelayaran	Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase layanan pelayaran Persentase Bangunan dan Pengumpan Lokal yang diijinkan			
Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal					Masukan : Dana yang dibutuhkan Keluaran : Jumlah sarana dan prasarana pelabuhan yang terpelihara Hasil : Persentase standar fasilitas pelabuhan penyebrangan yang terpenuhi	(Rp) Paket %	501.563.000 4 78		